

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kondisi kota yang berpenduduk dalam jumlah besar dengan aktivitas kegiatan perkotaan yang padat dan kompek , diperlukan pelayanan transportasi berkapasitas tinggi dan ditata secara terpadu atau dinamis. Oleh karena itu pada dasarnya transportasi merupakan *derived demand* artinya permintaan akan jasa transportasi timbul dari permintaan sektor-sektor lain.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan dan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia.

Transportasi mempunyai fungsi ganda, di satu sisi harus mampu menunjang dan di sisi lain juga dituntut harus mampu merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dalam arti harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana.

Seiring perkembangan kota maka kebutuhan transportasi diperkotaan meningkat pula, menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat

kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis model angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan rambu lalu lintas.

Di dalam Peraturan Daerah kota Bandung Nomor.2 tahun 2014.Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang mengatur tentang Rambu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Di samping itu dalam tata pelaksanaan lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar dan nyaman di sepanjang jalur lalu lintas maka dibutuhkan penggunaan rambu-rambu lalu lintas.

Pentingnya penggunaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebagaimana tersebut diatas, maka penempatannya harus berdasarkan kebutuhan. Rambu Pendahulu Petunjuk jurusan (RPPJ) di Kota Bandung penempatannya sebagian kurang mampu memberikan informasi dan mengarahkan lalu lintas sehingga diperlukan tindak lanjut untuk peletakan rambu yang efektif dan efisien sehingga maksud penempatan rambu dapat tercapai. Di samping peletakan yang kurang tepat juga diperlukan penambahan rambu seiring dengan perkembangan Kota Bandung.

Upaya mengantisipasi atau mengurangi permasalahan transportasi di kawasan Kota Bandung diperlukan pendekatan sistem transportasi makro yaitu dengan membagi sistem tersebut menjadi sistem transportasi mikro yang masing-masing mempunyai keterkaitan dan saling mempengaruhi. sistem transportasi mikro yaitu sistem pergerakan diatur dengan sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas. Sistem pergerakan memegang peranan penting dalam menampung pergerakan yang lancar sehingga mempengaruhi kembali sistem kegiatan dan sistem jaringan yang ada dalam bentuk aksesibilitas dan mobilitas.

Secara empiris fenomena permasalahan transportasi di Kota Bandung utamanya pada ruas jalan utama diakibatkan lalu lintas yang bercampur, perilaku dan kedisiplinan pengendara. Terjadinya gangguan sirkulasi lalu lintas khususnya di pusat kota akibat tidak teraturnya pergerakan pejalan kaki dan kendaraan (bermotor dan non motor).

Pada tahap observasi awal di lapangan, peneliti dapat mengilustrasikan kondisi riil penataan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kota Bandung pada tahun 2016 antara lain disebabkan oleh indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Masih banyaknya pengguna jalan yang memarkir kendaraannya pada tempat yang tidak semestinya sehingga mengganggu arus kendaraan yang melintas.
2. Rawan kecelakaan, dimana para pengguna jalan mengendarai kendaraannya di atas rata-rata.
3. Masih banyaknya berbagai keluhan dari pengguna jalan, seperti wisatawan dalam negeri atau luar negeri, dan beberapa pengusaha yang

datang ke Bandung sangat menyesalkan tentang keadaan kota Bandung, karena kurangnya penghubung jalan.

Sedangkan data kuantitatif berikut ini, peneliti mengilustrasikan keadaan rambu lalu lintas yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tabel berikut ini:

Tabel. 1
Rencana dan Realisasi Rambu-rambu Lalu lintas di Kota Bandung
Tahun 2014 - 2016.

Tahun	2014		2015		2016	
	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang terrealisasi	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang terrealisasi	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang terrealisasi
RPPJ	300	20	280	40	240	24
PERINGATAN	70	35	35	28	7	1
LARANGAN	80	32	48	36	12	-
PETUNJUK	90	46	44	33	11	1
PENEGASAN	75	45	30	25	5	-
JUMLAH	615	168	437	164	275	26

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2017

Dari hasil rekapitulasi tersebut di atas, menunjukkan bahwa penataan rambu lalu lintas di Kota Bandung selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2016 (3 tahun) belum optimal atau tidak efektif. Tercatat hanya 358 rambu yang telah tertata dari 615 rambu yang dibutuhkan. Hal tersebut menunjukkan masalah utama dalam rangka mengoptimalkan penataan rambu lalu lintas setiap tahunnya. Dengan kalimat lain bahwa terjadinya ketidakefektifan diakibatkan belum ada kesesuaian antara yang dibutuhkan dengan realisasi peraturan rambu-rambu lalu lintas di Kota Bandung yang dirasakan perkembangannya belum memadai setiap tahunnya.

Indikasi lainnya yang ditemukan di lapangan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemacetan akibat rambu-rambu lalu lintas atau *traffic light* tidak jalan (optimasi tujuan).
2. Kurangnya sistem informasi Dinas Perhubungan dengan pihak terkait dalam penataan rambu-rambu lalu lintas (perspektif sistematis).
3. Aparat kurang menunjukkan dalam penegakkan hukum pada pelanggar rambu-rambu lalu lintas (perilaku manusia dalam susunan organisasi).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas, peneliti menduga kurang optimalnya penataan rambu lalu lintas di Kota Bandung dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, peneliti mencoba menghubungkannya dengan salah satu variabel koordinasi oleh Dinas Perhubungan. Karena secara teoritis koordinasi berhubungan erat dengan pengintegrasian dan sinkronisasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

Dalam mengadakan koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan, diantaranya dengan Dinas Kepolisian, Dinas Pertamanan, dan Dinas Bina Marga. Keterkaitan dengan Dinas Kepolisian, yang salah satu tugasnya mengatur lalu lintas yaitu mengenai perizinan pemasangan rambu, dan penataan rambu yang tepat. Penataan rambu lalu lintas yang tepat sangat membantu tugas kepolisian dalam mengatur ketertiban lalu lintas, maka dari itu kepolisian mempunyai keterkaitan yang kuat dalam penataan rambu lalu lintas.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini, karena menurut pengamatan selain diperlukan penataan lalu lintas juga diperlukan koordinasi yang baik antara

Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pembuatan rambu lalu lintas dengan pihak yang terkait seperti Kepolisian sebagai penegak hukum, Bina Marga, dan Dinas Pertamanan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menghubungkan variabel koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan pihak yang terkait, karena secara teoritis koordinasi dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja sehingga akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk lebih mengetahui dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Koordinasi Oleh Dinas Perhubungan terhadap Efektivitas Penataan Rambu Lalu Lintas di Kota Bandung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan Penataan Rambu Lalu lintas di Kota Bandung, sebagai berikut : “Seberapa besar pengaruh Koordinasi oleh Dinas Perhubungan terhadap Efektivitas Penataan Rambu Lalu lintas di Kota Bandung”.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Pengaruh Koordinasi Dinas perhubungan terhadap Efektivitas Penataan Rambu Lalu lintas di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur besarnya pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penataan rambu lalu lintas di Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait (Dinas Perhubungan, Kepolisian, Bina Marga, dan Dinas Pertamanan) dalam pengaturan sistem rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas khususnya untuk penempatan rambu lalu lintas di Kota Bandung.